

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan dilakukan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

##### **a. Pulungan (2015)**

Penelitian Pulungan (2015) meneliti tentang Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pulungan (2015) adalah sama-sama menggunakan Keadilan sebagai Variabel Independen dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

- b. Penelitian ini menggunakan sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**b. Ardhyaksa (2014)**

Penelitian Ardhyaksa (2014) meneliti tentang Tax Evasion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhyaksa (2014) adalah sama-sama menggunakan Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkup KPP Pratama Pati dan berdomisili di Kabupaten Pati, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan ketepatan pengalokasian, kecurangan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**c. Elmiza, dkk (2014)**

Penelitian Elmiza, dkk (2014) meneliti tentang Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Elmiza, dkk (2014) adalah sama-sama menggunakan Keadilan sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan responden dari beberapa wajib pajak dikota Padang, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan sistem perpajakan, diskriminasi sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**d. Kurniawati dan Toly (2014)**

Penelitian Kurniawati dan Toly (2014) meneliti tentang Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak

berpengaruh terhadap perpsepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) adalah sama-sama menggunakan Keadilan, Tarif Pajak sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di Surabaya Barat, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan biaya kepatuhan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**e. Handayani dan Cahyonowati (2014)**

Penelitian Handayani dan Cahyonowati (2014) meneliti tentang Penggelapan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak persepsi tentang penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan ketaatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani

dan Cahyonowati (2014) adalah sama-sama menggunakan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Semarang, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan sistem perpajakan, norma, ketaatan, dan diskriminasi sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**f. Friskianti (2014)**

Penelitian Friskianti (2014) meneliti tentang tindakan *Tax Evasion*. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. *Self assessment system*, keadilan, Teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Friskianti (2014) adalah sama-sama menggunakan Keadilan, Teknologi Perpajakan sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan *Self Assessment System*, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**g. Permatasari (2013)**

Penelitian Permatasari (2013) meneliti tentang minimalisasi *Tax Evasion*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk meminimalkan penggelapan pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan perpajakan dan alokasi akurasi belanja pemerintah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, baik parsial dan simultan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Permatasari (2013) adalah sama-sama menggunakan Tarif, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan sebagai Variabel Independen, serta Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen. Sedangkan perbedaannya adalah :



- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**h. Chiarini, dkk (2013)**

Penelitian Chiarini, dkk (2013) meneliti tentang Tax Rates and Tax Evasion. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara empiris karakteristik penggelapan pajak dan hubungan dengan beban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan beban pajak nyata dari beban pajak efektif, ditemukan bahwa dua tarif pajak selama periode tersebut diperiksa, kesenjangan permanen, dengan tarif pajak efektif permanen lebih tinggi dari tarif pajak nyata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chiarini, dkk (2013) adalah sama-sama menggunakan Tarif Pajak sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak dari Badan Pendapatan Italia, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

- b. Penelitian ini menggunakan beban pajak sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

**i. Mughal dan Akram (2012)**

Penelitian Mughal dan Akram (2012) meneliti tentang Reasons Of Tax Avoidance and Tax Evasion. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali alasan atau penyebab penghindaran pajak dan penggelapan pajak di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel alasan atau penyebab penghindaran pajak dan penggelapan di Pakistan sudah benar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mughal dan Akram (2012) adalah sama-sama menggunakan Tarif Pajak sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan yang tidak go publik, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan Moralitas pajak, Kurangnya penegakan hukum, Insentif pajak, Sistem pajak, Kampanye pencerahan publik, dan Kemiskinan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.



#### **j. Dalu (2012)**

Penelitian Dalu (2012) meneliti tentang Impact Of Tax Evasion And Avoidance On The Economy. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana penggelapan pajak menghancurkan ekonomi dan bagaimana hal itu menghambat ZIMRA dalam melaksanakan tugas dan memenuhi berbagai target. Penelitian ini juga bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan kepada ZIMRA, pemerintah, operator sehingga untuk memecahkan masalah-masalah penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penggelapan pajak dan penghindaran celah dalam undang-undang perpajakan dan perubahan sering terjadi di peraturan pajak dan penegakan efektif dan kepatuhan pengelolaan sukarela.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dalu (2012) adalah sama-sama menggunakan Tarif Pajak sebagai Variabel Independen, dan Penggelapan Pajak sebagai Variabel Dependen.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan 45 klien sementara wawancara yang ada di ZIMRA Kurima dan Pelabuhan Harare, sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini menggunakan Kemiskinan, Tingkat inflasi, Celah dalam undang-undang pajak , Korupsi dan suap, Penegakan efektif, Catatan akuntansi yang memadai sebagai variabel independen, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu :

- a. *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut
- b. *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
- c. *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

Niat individu untuk berperilaku dalam menghindari pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Kondisi dimana munculnya niat seseorang untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang kemudian menjadikan individu akan mulai berperilaku.

### 2.2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu model yang dibuat untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Menurut Davis (1986) perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan Teknologi Informasi (*ease of use*). Davis mengartikan persepsi mengenai kegunaan (*usefulness*) ini berdasarkan definisi dari kata *useful* yaitu dapat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan serta manfaat yang dapat diperolehnya apabila menggunakan teknologi informasi.

### 2.2.3 **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan penghindaran pajak secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak adalah wajib pajak melakukan usaha untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang perpajakan Ardhyaksa (2014). Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara ilegal. Wajib pajak akan cenderung mengabaikan ketentuan dari undang-undang perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen pemeriksaan pajak, mengisi data yang tidak lengkap atau bukan sebenarnya.

Penggelapan pajak yaitu wajib pajak melakukan tindakan menghindari pajak dengan berbagai cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Bila saat diadakan pemeriksaan pajak, wajib pajak diketahui melakukan penggelapan pajaka, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Nurmantu, 2004:26) adalah :

- a. Wajib pajak memiliki peluang untuk melakukan penggelapan pajak karena adanya ketentuan pajak yang belum mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukannya relatif kecil untuk diketahui oleh pihak fiskus.
- c. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resiko yang dihadapi.
- d. Sanksi perpajakan yang ditetapkan tidak terlalu berat.
- e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak.
- f. Pelaksanaan penegakan hukum yang masih lemah atau bervariasi.

Tindakan penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh (Brotodiharjo, 2007:40) :

1. Ketidaktahuan (*Ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak mengetahui akan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Kesalahan (*Error*) yaitu wajib pajak paham dan mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung data terkait pajak terutang yang dilaporkan.

3. Kesalahpahaman (*Missunderstanding*) yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Kealpaan (*Negligence*) yaitu wajib pajak lupa untuk menyimpan buku dan bukti-bukti lengkap terkait jumlah pajak terutang yang dihitung.

#### 2.2.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif yang ditetapkan. Ada empat macam tarif pajak, diantaranya sebagai berikut :

a. Tarif Proposional

Tarif yang berupa persentase dimana besarnya pajak yang terutang adalah proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap setiap periode.

c. Tarif Progresif

Tarif pajak dengan persentase tarif yang digunakan akan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar pula.

d. Tarif Degresif

Tarif pajak dengan persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil apabila jumlah dikenai pajak semakin besar.

### 2.2.5 Keadilan Sistem Perpajakan

Menurut Siahaan (2010:112) ada tiga pendekatan pemikiran tentang keadilan sebagai berikut :

#### a. Prinsip Manfaat

Prinsip ini menyatakan bahwa sistem pajak dapat dikatakan adil apabila besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang telah diperolehnya dari jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Prinsip Kemampuan untuk Membayar

Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah dan negara memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, maka dari itu setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak, namun pembayarannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak sendiri.

#### c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Prinsip ini mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak memenuhi kriteria keadilan horizontal apabila wajib pajak berada dalam kondisi yang sama diperlakukan secara sama pula dalam hal sebagai berikut (Andria 2008 :18) :

a. Definisi penghasilan

Apabila beban pajak yang dikenakan sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan dan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan wajib pajak.

b. *Globality*

Seluruh tambahan dari kemampuan ekonomis harus ditambahkan sebagai objek pajak dan dijadikan ukuran membayar.

c. *Net Income*

Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi biaya-biaya yang termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

d. *Personal Exemption*

Pengurangan atas beban pajak terutang yang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada periode tersebut.

e. *Equal Treatment for The Equals*

Seluruh penghasilan wajib pajak akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa mempertimbangkan jenis atau sumber penghasilan.

## 2. Keadilan Vertikal

Pemungutan pajak memenuhi kriteria adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya (Andria 2008:19). Syarat-syarat keadilan vertikal adalah sebagai berikut :



*a. Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tarif pajak terutang dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

*b. Progression*

Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan besar, harus membayar pajak yang besar pula dengan presentase tarif yang besar, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

#### **2.2.6 Teknologi dan Informasi Perpajakan**

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Modernisasi layanan perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*, *e-billing*, *on line payment*. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penggunaan teknologi untuk mencari informasi maupun pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi dinilai masih sangat rendah (Friskianti:2014). Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Prediksi atas penggunaan teknologi perpajakan adalah semakin tinggi dan modern teknologi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak di wilayah tersebut.

### **2.2.7 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan, dan penghitungannya digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah besaran persentase untuk menghitung jumlah pajak terutang. Dikutip dari Permatasari (2013) wajib pajak memiliki penilaian sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Peningkatan tarif pajak yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi negara, namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin besar pula tingkat penggelapan pajak. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima negara semakin menurun. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak antara lain Kurniawati dan Toly (2014), Permatasari (2013), Chiarini, dkk (2013), Mughal dan Akram (2012), Dalu (2012)

### **2.2.8 Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Pemungutan besarnya pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sehingga dapat dikatakan bersifat adil. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka akan semakin memicu timbulnya tindakan penggelapan pajak (Permatasari:2013).

Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Jika tingkat ketidakadilan sistem perpajakan yang berlaku semakin tinggi,

maka akan berdampak pada tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak antara lain Pulungan (2015), Elmiza, dkk (2014), Kurniawati (2014), Handayani (2014), Friskanti (2014)

### **2.2.9 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan**

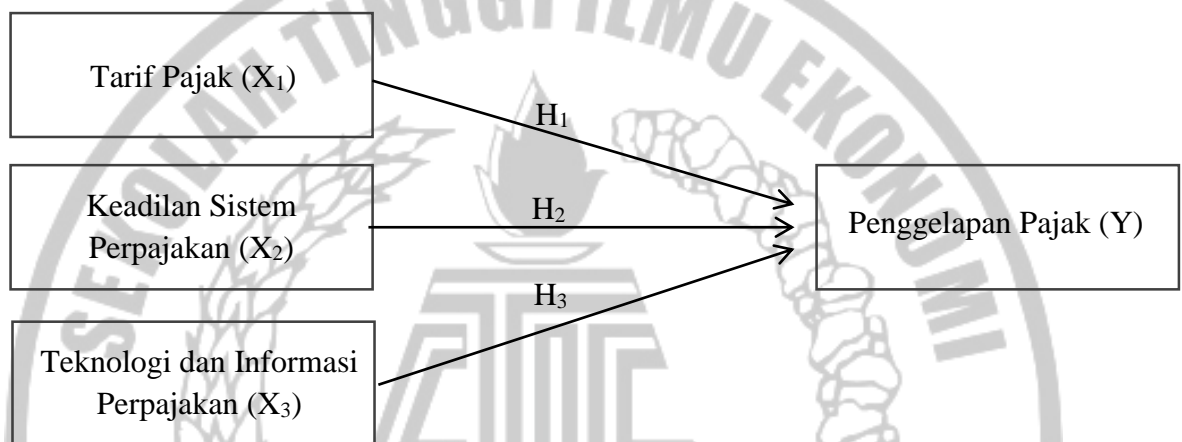
#### **Pajak**

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah telah melakukan modernisasi layanan perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Penggunaan teknologi untuk mencari informasi terkait dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak.

Banyak wajib pajak yang memiliki anggapan dari sisi teknologi dan informasi perpajakan jika semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. (<http://efilling.pajak.go.id/index>). Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak antara lain Ardhyaksa (2014), Friskianti (2014), dan Permatasari (2013)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Atas dasar ketidakkonsistennya hasil temuan beberapa penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sistematika kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**GAMBAR 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka yang digambarkan diatas dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Persepsi atas tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
- H<sub>2</sub> : Persepsi atas keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
- H<sub>3</sub> : Persepsi atas teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.